

Akuntansi Keberlanjutan pada Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Perspektif *Triple Bottom Line*

Riana Sitio^{1*}, Taraweh Harahap², Rini Antika Ritonga³

¹²³Universitas Islam Labuhan Batu, Labuhanbatu, Indonesia

*Correspondence Author's Email: sitior49@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh aspek pemenuhan gizi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui praktik akuntansi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan perspektif *Triple Bottom Line* yang meliputi dimensi *profit*, *people*, dan *planet*, serta menganalisis penerapan praktik akuntansi keberlanjutan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG telah mencerminkan prinsip *Triple Bottom Line* melalui pemberdayaan UMKM dan pemasok lokal yang meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (*profit*), peningkatan akses makanan bergizi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*people*), serta penerapan sanitasi, keamanan pangan, dan pemanfaatan pangan lokal (*planet*). Praktik akuntansi keberlanjutan telah diterapkan melalui penyediaan standar operasional prosedur, pembagian tugas, dokumentasi kegiatan, dan tata kelola administrasi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas program. Namun demikian, sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan masih memerlukan penguatan agar dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diukur secara lebih komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi keberlanjutan pada sektor publik, khususnya dalam evaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Kata kunci: Akuntansi keberlanjutan, Program MBG, *Triple Bottom Line*, Sektor publik, Pembangunan berkelanjutan

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is one of the Indonesian government's strategic initiatives to improve community nutrition while supporting sustainable development. The success of its implementation depends not only on achieving nutritional outcomes but also on creating economic, social, and environmental value through sustainability accounting practices. This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal Program in Labuhan Batu Regency based on the Triple Bottom Line (TBL) perspective, encompassing the dimensions of profit, people, and planet, and to examine the implementation of sustainability accounting practices in promoting transparency, accountability, and program sustainability. This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the MBG program reflects the principles of the Triple Bottom Line by empowering local micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and local suppliers to stimulate regional economic activities (*profit*), improving access to nutritious food, strengthening human resource capacity, and fostering stakeholder collaboration (*people*), as well as implementing food sanitation, food safety standards, and the utilization of

local food resources (planet). Sustainability accounting practices are reflected in the implementation of standard operating procedures, clear division of responsibilities, administrative documentation, and governance systems that enhance transparency and accountability. However, monitoring, evaluation, and sustainability reporting systems require further improvement to comprehensively measure the program's economic, social, and environmental impacts. This study contributes to the development of sustainability accounting literature in the public sector, particularly in evaluating the implementation of Indonesia's Free Nutritious Meal Program.

Keywords: *Sustainability accounting, Free NMP, Triple Bottom Line, Public sector, Sustainable developmen*

Article History:

Submitted: July 13, 2026

Revised: July 19, 2026

Accepted: July 21, 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pembangunan global telah menggeser orientasi organisasi sektor publik maupun sektor privat dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Bebbington & Unerman, 2020). Pergeseran tersebut menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan. Dalam konteks tersebut, akuntansi tidak lagi dipahami sebatas instrumen pencatatan transaksi keuangan, melainkan berkembang menjadi akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) yang berfungsi menghasilkan informasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Gray, 2010; IFAC, 2023; Pargmann & Berding, 2024). Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, organisasi publik dituntut tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga menunjukkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui praktik akuntansi yang berkelanjutan.

Konsep akuntansi keberlanjutan berkembang seiring munculnya paradigma *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan oleh Elkington (1997). Paradigma ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga melalui kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam praktik akuntansi modern, konsep TBL telah menjadi salah satu kerangka penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), pengukuran kinerja organisasi, serta evaluasi kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat. Integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem akuntansi memungkinkan organisasi menghasilkan informasi yang lebih komprehensif sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, implementasi akuntansi keberlanjutan tidak hanya

relevan bagi dunia usaha, tetapi juga semakin penting diterapkan pada sektor publik yang mengelola program-program strategis nasional dengan pembiayaan yang besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (GRI, 2021; Adams, 2020).

Salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang memiliki dimensi keberlanjutan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2025 melalui koordinasi Badan Gizi Nasional dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menurunkan prevalensi stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan rantai pasok pangan lokal. Implementasi program tersebut tidak hanya memerlukan dukungan pembiayaan yang besar, tetapi juga sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, efisien, dan mampu menciptakan manfaat sosial serta memperhatikan dampak lingkungan. Oleh sebab itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dari sejauh mana pengelolaan program mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan kata lain, keberhasilan MBG memerlukan perspektif akuntansi keberlanjutan yang mengintegrasikan dimensi profit, people, dan planet secara seimbang. Kajian kebijakan terbaru juga menegaskan bahwa evaluasi implementasi MBG perlu dilakukan secara multidimensional karena program ini berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan secara bersamaan.

Dalam implementasinya di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Labuhan Batu, Program MBG menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut tata kelola anggaran, koordinasi antarpemangku kepentingan, pengadaan bahan pangan, pengelolaan limbah makanan, hingga akuntabilitas pelaporan kegiatan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memberikan manfaat bagi peserta didik dan melibatkan berbagai aktor, seperti sekolah, penyedia makanan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut juga memperlihatkan perlunya penguatan praktik akuntansi keberlanjutan, khususnya dalam pencatatan biaya lingkungan, evaluasi manfaat sosial, dan integrasi indikator keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan program. Temuan serupa juga dilaporkan dalam penelitian terkini yang menunjukkan bahwa implementasi MBG telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan melalui pengelolaan limbah, penerapan prosedur kebersihan, dan penggunaan sarana yang lebih ramah lingkungan, meskipun pencatatan biaya lingkungan masih belum dilakukan secara terpisah sehingga evaluasi keberlanjutan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG masih memerlukan penguatan dari perspektif akuntansi keberlanjutan berbasis Triple Bottom Line agar akuntabilitas program tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu daerah yang mulai mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya

pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha mikro, implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan akses pangan bergizi bagi siswa, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha, pemasok bahan pangan, serta tenaga kerja di sekitar sekolah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan MBG di Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan adanya sinergi antara sekolah, penyedia makanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti mekanisme pencatatan biaya operasional yang belum mengakomodasi biaya sosial dan lingkungan secara eksplisit, evaluasi manfaat ekonomi yang masih berfokus pada realisasi anggaran, serta belum adanya indikator keberlanjutan yang digunakan dalam pelaporan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi pada implementasi MBG masih didominasi oleh aspek akuntabilitas keuangan, sementara dimensi keberlanjutan yang mencakup people, planet, dan profit belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pengelolaan maupun evaluasi program. Padahal, dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, keberhasilan suatu program publik seharusnya diukur berdasarkan kemampuan menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan sehingga manfaat program dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi akuntansi keberlanjutan dan Triple Bottom Line pada berbagai sektor, namun masih memperlihatkan keterbatasan ketika dikaitkan dengan kebijakan publik seperti Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian Lubis dkk. menunjukkan bahwa penerapan TBL mampu meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja ekonomi pada UMKM, namun penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada sektor usaha sehingga belum menjelaskan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam pengelolaan program pemerintah. Penelitian Sopanah dkk. mengkaji akuntansi keberlanjutan pada komunitas budaya melalui pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa dimensi sosial memiliki peran dominan dalam menjaga keberlanjutan organisasi, tetapi belum mengaitkannya dengan tata kelola anggaran publik. Sementara itu, Wardani mengungkapkan bahwa implementasi MBG telah mulai mengintegrasikan prinsip akuntansi lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah dan kebersihan, namun kajiannya masih terbatas pada dimensi lingkungan sehingga belum mengevaluasi keterkaitan antara manfaat ekonomi, dampak sosial, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara terpadu. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntansi keberlanjutan masih banyak dikembangkan pada sektor korporasi dan komunitas, sedangkan pada program strategis pemerintah yang bersifat lintas sektor seperti MBG masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak membahas aspek gizi, kesehatan, efektivitas kebijakan, dan pengelolaan operasional, sedangkan

perspektif akuntansi keberlanjutan masih jarang digunakan sebagai kerangka analisis. Kedua, penelitian mengenai akuntansi keberlanjutan pada umumnya berorientasi pada perusahaan, industri manufaktur, atau UMKM sehingga belum banyak diaplikasikan dalam evaluasi program publik yang menggunakan anggaran negara. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan secara bersamaan dimensi profit, people, dan planet dalam mengevaluasi implementasi MBG di tingkat daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis implementasi Program MBG di Kabupaten Labuhan Batu melalui perspektif Triple Bottom Line sebagai kerangka akuntansi keberlanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas program, tidak hanya dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari penciptaan manfaat sosial, kontribusi terhadap ekonomi lokal, serta perhatian terhadap aspek lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori akuntansi keberlanjutan pada sektor publik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola Program MBG yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena memberikan perspektif baru mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya dinilai dari keberhasilan distribusi makanan atau penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui praktik akuntansi yang akuntabel dan transparan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pengelola program, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun sistem evaluasi berbasis keberlanjutan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis implementasi Program MBG di Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan perspektif Triple Bottom Line yang meliputi dimensi profit, people, dan planet; serta (2) menganalisis bagaimana praktik akuntansi keberlanjutan diterapkan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhan Batu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi Program MBG dalam perspektif akuntansi keberlanjutan berdasarkan dimensi TBL yang meliputi *profit*, *people*, dan *planet*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena yang terjadi secara alamiah, menginterpretasikan makna dari berbagai informasi yang diperoleh, serta menjelaskan hubungan antarkomponen dalam implementasi program secara komprehensif. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu konteks tertentu, yaitu pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Labuhan Batu,

sehingga memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap praktik pengelolaan program dalam lingkungan nyata (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa sekolah pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhan Batu yang telah menerima dan mengimplementasikan program tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri atas kepala sekolah, bendahara sekolah, pengelola Program MBG, penyedia makanan atau pengelola dapur, guru, serta pihak lain yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan hingga data yang diperoleh mencapai kejenuhan informasi (*data saturation*) sehingga tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan Program MBG, mulai dari proses penyediaan makanan, distribusi kepada peserta didik, hingga pengelolaan sisa makanan dan lingkungan sekitar. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai praktik akuntabilitas, transparansi, manfaat ekonomi, dampak sosial, serta pengelolaan aspek lingkungan dalam implementasi program. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, dokumen administrasi, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG. Penggunaan ketiga teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan data sekaligus mendukung proses triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles et al., 2014). Seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian dikategorikan berdasarkan dimensi TBL yang terdiri atas aspek profit, people, dan planet. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antartema, serta makna yang menggambarkan implementasi akuntansi keberlanjutan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhan Batu. Model analisis ini memungkinkan proses analisis berlangsung secara berulang sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perspektif *Triple Bottom Line*

Implementasi Program Makan MBG di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga telah mengakomodasi dimensi ekonomi, sosial,

dan lingkungan sebagaimana konsep TBL. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi program telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, hingga pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Sinergi tersebut menjadi indikator bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada peserta didik, tetapi juga dari nilai tambah yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

Tabel 1. Ringkasan Implementasi Program MBG Berdasarkan Perspektif Triple Bottom Line

Dimensi	Indikator	Temuan Penelitian
Profit	Pengadaan bahan pangan	Mengutamakan UMKM dan pemasok lokal
Profit	Efisiensi operasional	Harga bahan relatif terjangkau dan mudah diperoleh
Profit	Dampak ekonomi	Menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan aktivitas ekonomi
People	Manfaat sosial	Meningkatkan akses makanan bergizi bagi peserta didik, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui
People	Tata kelola SDM	SDM memperoleh pelatihan dan bekerja sesuai SOP
People	Kolaborasi	Koordinasi antarinstansi berjalan baik
Planet	Sanitasi	Pengolahan makanan mengikuti standar keamanan pangan
Planet	Kebersihan	Lingkungan dapur terjaga dan memenuhi standar kebersihan
Planet	Pangan lokal	Pemanfaatan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG

Dimensi Profit (*Economic Value*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan lebih mengutamakan pemasok lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga menciptakan perputaran ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, keberadaan SPPG turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sebagai tenaga pengolah makanan, distribusi, kebersihan, maupun administrasi. Informan juga menjelaskan bahwa penggunaan pemasok yang beragam menjadi strategi untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan pangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional program. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan UMKM dan pemasok lokal memberikan dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal serta memperluas peluang usaha bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil di sekitar wilayah pelaksanaan program. Pola pengadaan tersebut juga mampu memperpendek rantai

distribusi sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien, kualitas bahan pangan lebih terjaga, dan pasokan dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Dari perspektif akuntansi keberlanjutan, kondisi ini mencerminkan bahwa dimensi *profit* tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga melalui kemampuan program dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Program MBG berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja, serta terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip TBL.

Dimensi People (*Social Value*)

Pada dimensi sosial, Program MBG memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program tidak hanya menysasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok prioritas penerima manfaat. Selain meningkatkan kualitas pemenuhan gizi, implementasi program didukung oleh sumber daya manusia yang telah memperoleh pelatihan keamanan pangan, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta menjalankan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa koordinasi antara pengelola SPPG, sekolah, pemerintah daerah, dan instansi kesehatan berlangsung dengan baik sehingga pelayanan kepada penerima manfaat dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dimensi *people* dalam implementasi MBG tidak hanya tercermin pada peningkatan kualitas layanan gizi, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM serta kolaborasi antarorganisasi dalam mendukung keberhasilan program.

Lebih lanjut, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan program. Pembagian peran yang jelas antara sekolah, tenaga kesehatan, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah mempercepat proses koordinasi, pengawasan, serta penyelesaian berbagai kendala operasional yang muncul selama implementasi program. Di sisi lain, pelatihan yang diberikan kepada tenaga pengolah makanan dan petugas distribusi turut meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan sehingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat dapat dipertahankan. Dari perspektif TBL dan dimensi *people* tercermin melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta terciptanya kolaborasi yang efektif antarorganisasi. Dengan demikian, implementasi Program MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membangun modal sosial yang mendukung keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dimensi Planet (*Environmental Value*)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, aspek lingkungan telah menjadi bagian dari pelaksanaan Program MBG meskipun masih dalam lingkup operasional. Seluruh proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar sanitasi dan keamanan pangan, sedangkan kebersihan area dapur, peralatan produksi, dan lingkungan kerja

terjaga dengan baik. Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi mengurangi distribusi pangan dari wilayah yang lebih jauh sehingga mendukung efisiensi logistik. Hasil observasi memperlihatkan bahwa indikator kebersihan lingkungan, fasilitas kerja, serta kepatuhan terhadap SOP memperoleh penilaian baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG telah mengintegrasikan dimensi *planet* melalui penerapan sanitasi, kebersihan lingkungan, dan pengelolaan pangan yang memenuhi standar operasional.

Selain aspek sanitasi dan kebersihan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola Program MBG mulai menerapkan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pengelolaan bahan pangan dilakukan secara terencana untuk mengurangi potensi pemborosan, sementara sisa makanan dipisahkan dari sampah lainnya agar memudahkan proses penanganan limbah. Penggunaan bahan pangan yang berasal dari wilayah sekitar juga berkontribusi terhadap penurunan kebutuhan transportasi jarak jauh sehingga secara tidak langsung membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon dalam proses distribusi. Meskipun praktik pengelolaan lingkungan tersebut masih bersifat operasional dan belum didukung oleh sistem pelaporan lingkungan yang terstruktur, temuan ini menunjukkan adanya komitmen pengelola dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam pelaksanaan Program MBG. Dengan demikian, dimensi *planet* tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar sanitasi dan keamanan pangan, tetapi juga melalui upaya menjaga efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, serta mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi TBL.

Praktik Akuntansi Keberlanjutan pada Implementasi Program MBG

Selain mencerminkan prinsip TBL, implementasi Program MBG di Kabupaten Labuhanbatu juga memperlihatkan praktik akuntansi keberlanjutan melalui penerapan tata kelola program yang transparan dan akuntabel. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung oleh struktur organisasi, standar operasional prosedur, dokumen pembagian tugas, data pemasok, dokumen pengadaan bahan pangan, laporan pelaksanaan kegiatan, serta dokumentasi operasional. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun operasional.

Tabel 2. Praktik Akuntansi Keberlanjutan pada Implementasi Program MBG

Aspek	Temuan
Transparansi	SOP pelaksanaan tersedia
Akuntabilitas	Struktur organisasi dan pembagian tugas jelas
Dokumentasi	Dokumen pengadaan, pelaksanaan, dan kerja sama tersedia
Tata Kelola	Administrasi kegiatan berjalan baik
Kolaborasi	Koordinasi lintas instansi berjalan efektif

Temuan Perbaikan	Belum tersedia laporan monitoring dan evaluasi serta dokumentasi rapat koordinasi
------------------	---

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa administrasi kegiatan telah tersusun dengan baik, kepatuhan terhadap SOP dijalankan secara konsisten, serta koordinasi internal dan eksternal berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi MBG telah mengadopsi prinsip dasar akuntabilitas melalui pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan prosedur kerja yang terdokumentasi. Namun demikian, hasil dokumentasi mengidentifikasi bahwa laporan monitoring dan evaluasi serta dokumen rapat koordinasi belum tersedia secara lengkap. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik akuntansi keberlanjutan masih berfokus pada aspek administratif dan operasional, sedangkan mekanisme evaluasi keberlanjutan secara periodik belum sepenuhnya terdokumentasi.

Secara keseluruhan, implementasi Program MBG di Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip Triple Bottom Line melalui penciptaan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyediaan makanan bergizi dan pemberdayaan SDM, serta perhatian terhadap aspek lingkungan melalui penerapan sanitasi dan keamanan pangan. Di sisi lain, praktik akuntansi keberlanjutan telah tercermin melalui penerapan SOP, dokumentasi kegiatan, struktur organisasi, dan tata kelola operasional yang baik. Meskipun demikian, penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan masih diperlukan agar implementasi MBG tidak hanya akuntabel dari sisi administrasi, tetapi juga mampu menunjukkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan distribusi makanan bergizi, tetapi juga oleh kualitas sistem tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam jangka panjang.

Pembahasan

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa dimensi profit dalam kerangka TBL telah diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan yang mengutamakan UMKM dan pemasok lokal tidak hanya menjamin ketersediaan bahan baku, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan baru. Temuan ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah apabila melibatkan rantai pasok lokal secara berkelanjutan. Perspektif tersebut sejalan dengan konsep Triple Bottom Line yang menempatkan nilai ekonomi tidak hanya pada pencapaian efisiensi finansial, tetapi juga pada kemampuan organisasi menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung temuan Lubis et al. (2024) yang menyatakan bahwa penerapan konsep TBL mampu meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat kinerja ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Demikian pula, Wahyudi (2025) menjelaskan bahwa implementasi TBL pada organisasi dan UMKM di Indonesia memberikan dampak positif terhadap

keberlanjutan ekonomi karena mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pada dimensi *people*, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan melalui pelatihan SDM, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang efektif antara sekolah, SPPG, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, dimensi sosial menjadi indikator penting untuk mengukur nilai yang dihasilkan organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fahmie (2025) yang menegaskan bahwa sustainability accounting harus mampu mengintegrasikan aspek sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian Wardokhi (2023) mengenai implementasi *Pentuple Bottom Line* pada UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa keberhasilan program berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dimensi *planet* mulai diimplementasikan melalui penerapan sanitasi, kebersihan lingkungan kerja, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG. Walaupun aspek lingkungan dalam penelitian ini masih berfokus pada pengelolaan operasional, praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk meminimalkan risiko lingkungan sekaligus menjaga kualitas layanan. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, perhatian terhadap aspek lingkungan merupakan bagian dari upaya organisasi dalam menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saragi (2026) yang menyatakan bahwa penerapan *green accounting* berkontribusi terhadap peningkatan kinerja TBL melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Dwitasari (2025) yang menemukan bahwa praktik *green accounting* mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan melalui pengelolaan limbah dan penggunaan sumber daya secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, implementasi MBG di Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan karakteristik *akuntansi keberlanjutan* melalui penerapan SOP, struktur organisasi, pembagian tugas, dokumentasi kegiatan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan yang berjalan secara sistematis. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa belum tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi serta pelaporan keberlanjutan secara khusus menjadi kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik akuntansi keberlanjutan masih berorientasi pada aspek administratif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pengukuran dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara periodik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sustainability accounting

tidak berhenti pada pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup sistem pelaporan yang mampu menggambarkan kinerja keberlanjutan organisasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arvianti et al. (2025) yang menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi *green accounting* sebagai dasar penguatan akuntabilitas organisasi, serta didukung oleh penelitian Hasnidar et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa integrasi akuntansi lingkungan dan tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberlanjutan organisasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Kabupaten Labuhanbatu telah mencerminkan prinsip TBL melalui terciptanya manfaat ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Pada dimensi ekonomi, program berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM dan pemasok pangan lokal serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Pada dimensi sosial, MBG berhasil meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi, didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Sementara itu, dimensi lingkungan diwujudkan melalui penerapan standar sanitasi, keamanan pangan, dan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja. Selain itu, praktik akuntansi keberlanjutan telah mulai diterapkan melalui penyediaan standar operasional prosedur, struktur organisasi, dokumentasi kegiatan, dan sistem administrasi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan masih perlu diperkuat agar implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas administratif, tetapi juga mampu mengukur secara komprehensif dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari praktik akuntansi keberlanjutan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengembangan sistem pelaporan keberlanjutan berbasis TBL dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola Program MBG sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. A. (2020). Sustainability reporting and value creation. *Social and Environmental Accountability Journal*, 40(3), 191–197. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2020.1837643>
- Arvianti, M., Kartini, T., & Herlindawati, D. (2025). Pemahaman dan kepedulian *green accounting* para pelaku UMKM industri batik di Kecamatan Rogojampi Banyuwangi. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 10(1), 52–62. <https://doi.org/10.29407/jae.v10i1.24511>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the United Nations Sustainable Development Goals. *Accounting, Auditing &*

- Accountability Journal*, 33(7), 1657–1670. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4556>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwitasari, A. (2025). Efisiensi ekonomi dan lingkungan melalui implementasi *green accounting* pada UMKM. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Fahmie, A. (2025). Sustainable accounting for SMEs in Indonesia. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI universal standards 2021*. Global Reporting Initiative.
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability ... and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting and Business Research*, 40(1), 47–62. <https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9663388>
- Hasnidar, H., et al. (2025). Implementation of environmental accounting through environmentally friendly initiatives. *Atta'riiz: Journal of Islamic Economics*.
- International Federation of Accountants. (2023). *Developments in global sustainability reporting: A priority for the accountancy profession*. International Federation of Accountants.
- Lubis, N., Hutapea, T., Siagian, A., & Purba, B. (2024). Implementing Triple Bottom Line accounting to transform MSMEs financial performance. *International Journal of Trends in Accounting Research*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saragi, N. P. (2026). Pengaruh implementasi *green accounting* terhadap kinerja *Triple Bottom Line* pada UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara. *JIRA: Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Wahyudi, T. (2025). Aligning MSMEs with the *Triple Bottom Line*: A systematic literature review. *JPEKA*.
- Wardokhi, W. (2023). Penerapan konsep *Pentuple Bottom Line* pada UMKM dalam mewujudkan keberlanjutan usaha. *JABISI: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.